



KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 127 TAHUN 1982

TENTANG

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN/KOTA-
MADYA DAERAH TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAE-
RAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 April 1982 Nomor 581/08316 tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Desember 1981 Nomor 581/255/1981 dan tanggal 12 April 1982 Nomor 055/30/1982 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- Memperhatikan** : Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II :
1. Kabupaten Kendal, Tanggal : 18 Januari 1982
Nomor : 179/581/2/82
 2. Kabupaten Demak, Tanggal : 9 September 1981
Nomor : D.3/DPRD/1981
 3. Kabupaten Kudus, Tanggal : 10 September 1981
Nomor : 581/4/DPRD/IX/81

4. Kabupaten Batang, Tanggal : 29 Agustus 1981
Nomor : 050/369
5. Kabupaten Pematang, Tanggal : 4 Nopember 1981
Nomor : 172-1/109/DPRD/
81
6. Kabupaten Banjar-
negara Tanggal : 2 Oktober 1981
Nomor : 581/5 TH. 1981
7. Kabupaten Temang-
gung Tanggal : 8 September 1981
Nomor : DPRD.172.11/81-
82
8. Kabupaten Magelang, Tanggal : 18 Januari 1982
Nomor ; 1/DPRD/1982
9. Kabupaten Wonosobo, Tanggal : 12 Januari 1982
Nomor : 172/10/1982
10. Kabupaten Purworejo. Tanggal : 20 Januari 1982
Nomor : 1/DPRD/1982
11. Kabupaten Blora, Tanggal : 12 Januari 1982
Nomor : 172/KPTS-01
12. Kabupaten Tegal, Tanggal : 10 Pebruari 1982
Nomor : 01/DPRD/1982
13. Kabupaten Rembang, Tanggal : 14 Januari 1982
Nomor : 02/B/DPRD/I/1982
14. Kabupaten Brebes, Tanggal : 8 Maret 1982
Nomor : 04/SK. DPRD/82
15. Kabupaten Semarang, Tanggal : 19 Desember 1981
Nomor : 010/DPRD Kab.
Smg/81.
16. Kabupaten Jepara, Tanggal : 25 Maret 1982
Nomor : Kep. 22/DPRD. II/
82
17. Kabupaten Sukoharjo, Tanggal : 20 Agustus 1981
Nomor : 843/Um/DPRD/
VIII/81
18. Kabupaten Wonogiri, Tanggal : 13 Maret 1982
Nomor : 5/DPRD/Kep.
. 1981/82
19. Kabupaten Sragen, Tanggal : 19 Januari 1982
Nomor : 055/01/Th. 1982.

20. Kotamadya Pekalongan Tanggal : 5 Januari 1982
Nomor : 1/DPRD/1982
Tanggal : 12 Januari 1982
Nomor : 581/1394
21. Kotamadya Salatiga, Tanggal : 20 Januari 1982
Nomor : 170/69/1982
22. Kotamadya Magelang, Tanggal : 26 Desember 1981
Nomor : 17 Tahun 1981
23. Kotamadya Semarang, Tanggal : 25 Maret 1982
Nomor : 581/03 TH. 1982

tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pemngunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabu-
paten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang tersebut di
atas.

**Memperhatikan
Pula**

- : Keputusan-keputusan Bupati/Walikota/kepala
Daerah Tingkat II :
1. Kabupaten Kendal, Tanggal : 23 Januari 1982
Nomor : 188.4/581/255/IP/
1982
 2. Kabupaten Demak, Tanggal : 18 Januari 1982
Nomor : 511.2/188.4/75
 3. Kabupaten Kudus, Tanggal : 14 Desember 1981
Nomor : 1884/0333
 4. Kabupaten Batang, Tanggal : 1 Maret 1982
Nomor : 188.4/581/26/82
 5. Kabupaten Pemasang, Tanggal : 11 Pebruari 1982
Nomor : 581/519/81
 6. Kabupaten Banjar-
negara Tanggal : 22 Desember 1981
Nomor : 641/523/81
 7. Kabupaten Temang-
gung Tanggal : 19 Desember 1981
Nomor : Bang/52/SK/1981
 8. Kabupaten Magelang, Tanggal : 21 Januari 1981
Nomor : 188.4/581/D4/EK/
1982.
 9. Kabupaten Wonosobo, Tanggal : 15 Januari 1982
Nomor : 050/0159/Pemb/82

10. Kabupaten Purworejo, Tanggal : 31 Desember 1981
Nomor : 188.4/46/81
11. Kabupaten Blora, Tanggal : 20 Januari 1982
Nomor : 055.112/06/7/82
12. Kabupaten Tegal, Tanggal : 18 Pebruari 1982
Nomor : 581/697/1982
13. Kabupaten Rembang, Tanggal : 18 Januari 1982
Nomor : 581/15/1982
14. Kabupaten Brebes, Tanggal : 19 Maret 1982
Nomor : 511.2/57/05/1982
15. Kabupaten Semarang, Tanggal : 3 Pebruari 1982
Nomor : 644.1/080/1982
16. Kabupaten Jepara, Tanggal : 29 Maret 1982
Nomor : 522.4/01424
17. Kabupaten Sukoharjo, Tanggal : 16 April 1982
Nomor : 055/583/1982
18. Kabupaten Wonogiri, Tanggal : 5 April 1982
Nomor : 23 Tahun 1982
19. Kabupaten Sragen, Tanggal : 20 Januari 1982
Nomor : 055.112/06/7/82
20. Kotamadya Pekalongan Tanggal : 18 Januari 1982
Nomor : 511.2/009
Tanggal : 5 April 1982
Nomor : 055.112/041
21. Kotamadya Salatiga, Tanggal : 25 Januari 1982
Nomor : 581/09/1982
22. Kotamadya Magelang, Tanggal : 6 Maret 1982
Nomor : 511.2/57/03/1982
23. Kotamadya Semarang Tanggal : 15 April 1982
Nomor : 414/607/1982

tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 bagi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah I

Jawa Tengah perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.

2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

Mengingat

1. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (L.N. Tahun 1982 Nomor 13; T.L.N. Nomor 3216);
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980;
4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPE-NAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1981,

Nomor : 112 Tahun 1981

Nomor : 300/KMK.03/1981

Nomor : 216/A/Kpb/IV/1981

Nomor : 986/K/5/1981

Nomor : 14/3/Kep/GBI.

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 1981 dan Nomor 279 Tahun 1981 tentang

Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Surat Keputusan Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II tersebut di atas untuk menerima Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II sebagai tersebut di atas dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA :** Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Tahun Anggaran 1982/1983 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT :** Bantuan kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- KELIMA :** Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya mulai tahun ke-6 (enam) 1987/1988 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan harus memasukkan/

mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II masing-masing sampai pada tahun ke-15 (limabelas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.

KEENAM : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

KETUJUH : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal :

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.—

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang,
2. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II yang bersangkutan,
3. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,

3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia.

I sampai dengan 8 untuk dimaklumi.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 127 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN
PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABU-
PATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DALAM
LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH.**

Nomor Urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Kendal. 1. Pasar Cepiring 2. Pasar Boja 3. Pasar Glodog 4. Pasar Sukoreja	Rp. 46.500.000,- Rp. 57.250.000,- Rp. 36.250.000,- Rp. 40.000.000,- ----- Rp. 180.000.000,-	Pemugaran Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru
2.	Kabupaten Demak 1. Pasar Bintoro 2. Pasar Sidoreja 3. Pasar Belo 4. Kios Terminal	Rp. 50.000.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 15.000.000,- ----- Rp. 100.000.000,-	Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru
3.	Kabupaten Kudus 1. Pasar Kliwon 2. Pasar Jember	Rp. 600.000.000,- Rp. 200.000.000,- ----- Rp. 800.000.000,-	Pembangunan Baru Pembangunan Baru

1	2	3	4
4.	Kabupaten Batang 1. Pasar Bandar	Rp. 60.000.000,- -----	Pembangunan Baru
5.	Kabupaten Pematang 1. Pasar Pagi/Kota	Rp. 200.000.000,- -----	Pembangunan / Pemugaran.
6.	Kabupaten Banjarnegara 1. Pasar Ampera 2. Pasar Purwonegoro 3. Pasar Batur 4. Pasar Mandiraja	Rp. 6.526.000,- Rp. 17.000.000,- Rp. 47.300.000,- Rp. 19.174.000,- ----- Rp. 90.000.000,-	Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru
7.	Kabupaten Temanggung 1. Pasar Kliwon	Rp. 30.000.000,- -----	Pemb./Pemugaran
8.	Kabupaten Magelang 1. Pasar Kaponan	Rp. 65.000.000,- -----	Pembangunan Baru
9.	Kabupaten Wonosobo 1. Pasar Kertek 2. Pasar Kertek	Rp. 7.000.000,- Rp. 103.000.000,- ----- Rp. 110.000.000,-	Pemugaran Pembangunan / Pem.
10.	Kabupaten Purworejo 1. Pasar Purworejo II 2. Pasar Pituruh 3. Pasar Krendetan	Rp. 50.000.000,- Rp. 12.500.000,- Rp. 12.500.000,- ----- Rp. 75.000.000,-	Pembangunan/Pem. Pembangunan/Pem. Pembangunan/Pem.
11.	Kabupaten Blora 1. Ps. Unggas dan Kambing 2. Pasar Kota Cepu 3. Pasar Kota Blora	Rp. 18.000.000,- Rp. 22.000.000,- Rp. 60.000.000,- ----- Rp. 100.000.000,-	Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru

1	2	3	4
12.	Kabupaten Tegal 1. Pasar Kesambi 2. Pasar Bumijaya 3. Pasar Jejeg 4. Pasar Jatinegara 5. Pasar Jatipuro	Rp. 36.500.000,- Rp. 13.000.000,- Rp. 27.500.000,- Rp. 24.500.000,- Rp. 23.500.000,- ----- Rp. 125.000.000,-	Pemugaran Pembangunan Baru Pembangunan/Pem. Pembangunan/Pem. Pemugaran
13.	Kabupaten Rembang 1. Pasar Pandangan 2. Pasar Kota Rembang 3. Pasar Lasem	Rp. 20.000.000,- Rp. 45.000.000,- Rp. 35.000.000,- ----- Rp. 100.000.000,-	Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru
14.	Kabupaten Brebes 1. Pasar Bawang Lama 2. Pasar Jatibarang 3. Pasar Banjaratna 4. Pasar Sirampok 5. Pasar Material Brebes 6. Pasar Losari 7. Pasar Ketanggungan 8. Ps. Ikan/Daging Brebes	Rp. 12.088.000,- Rp. 40.320.000,- Rp. 22.450.000,- Rp. 22.724.000,- Rp. 15.133.000,- Rp. 24.842.000,- Rp. 31.970.000,- Rp. 30.473.000,- ----- Rp. 200.000.000,-	Pemugaran Pemugaran Pembangunan/Pem. Pembangunan Baru Pembangunan Baru Rehabilitasi Pembangunan Baru Pembangunan Baru
15.	Kabupaten Semarang 1. Pasar Bandarjo	Rp. 50.000.000,- -----	Pembangunan/Pem.
16.	Kabupaten Jepara 1. Pasar Krasak 2. Pasar Mayong 3. Pasar Bangsri 4. Pasar Margoyoso 5. Pasar Kota Jepara 6. Pasar Lebak 7. Pasar Pecangakan	Rp. 10.000.000,- Rp. 19.766.000,- Rp. 40.464.000,- Rp. 10.106.000,- Rp. 29.793.000,- Rp. 9.896.000,- Rp. 19.975.000,- ----- Rp. 140.000.000,-	Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru
17.	Kabupaten Sukoharjo 1. Pasar Daleman 2. Pasar Sedayu	Rp. 55.000.000,- Rp. 45.000.000,- ----- Rp. 100.000.000,-	Pemb./Pemugaran Pemb./Pemugaran

1	2	3	4
18.	Kabupaten Wonogiri 1. Pasar Tirtomoyo 2. Pasar Purwanto 3. Pasar Slogohimo 4. Pasar Baturetno	Rp. 20.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 50.000.000,- Rp. 20.000.000,- ----- Rp. 100.000.000,-	Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pemb./Pemugaran Pembangunan Baru
19.	Kabupaten Sragen 1. Pasar Bunder 2. Pasar Winong 3. Pasar Gondang 4. Pasar Rejowinangun/ Sambirejo 5. Pasar Gabungan 6. Pasar Blupuh 7. Pasar Ngandu Sumber- lawang	Rp. 30.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 33.000.000,- Rp. 13.000.000,- Rp. 44.000.000,- Rp. 28.000.000,- Rp. 32.000.000,- ----- Rp. 200.000.000,-	Pembangunan Baru Pem. / Pemugaran Pem. / Pemugaran Pem. / Pemugaran Pem. / Pemugaran Pembangunan Baru Pembangunan Baru
20.	Kotamadya Pekalongan 1. Pasar Banjarsari 2. Pasar Pantai 3. Pasar Podosugih 4. Pasar Grogolan 5. Pasar Sugihwaras 6. Pasar Anyar	Rp. 83.970.000,- Rp. 22.728.000,- Rp. 25.159.000,- Rp. 18.143.000,- Rp. 75.786.000,- Rp. 24.214.000,- ----- Rp. 250.000.000,-	Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pemb. / Pemugaran Pemb. / Pemugaran
21.	Kotamadya Salatiga 1. Pasar Rejosari 2. Pasar Baru	Rp. 291.000.000, Rp. 59.000.000,- ----- Rp. 350.000.000,-	Pemugaran Pembangunan Baru
22.	Kotamadya Magelang 1. Pasar Bertingkat Rejo- winangun	Rp. 500.000.000,-	Pemb. / Pemugaran

1	2	3	4
23.	Kotamadya Semarang 1. Pasar Sampangan 2. Pasar Srandol 3. Pasar Kabong 4. Pasar Gayonsari	Rp. 12.350.000,- Rp. 35.550.000,- Rp. 14.500.000,- Rp. 22.600.000,- <hr/> Rp. 85.000.000,-	Pemb. / Pemugaran Pemb. / Pemugaran Pemb. / Pemugaran Pemb. / Pemugaran

Jakarta, Mei 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.